

# MEMETAKAN AKTOR POLITIK LOKAL BANTEN PASCA ORDE BARU: Studi Kasus Kiai dan Jawara di Banten

Abdul Hamid

## Abstract

*This study analyzed the role of cultural political actors in Banten: Kiai and Jawara. The political role of Kiai in Banten has risen and fell down. In 1945 until 1950, all of the Bupati in Banten were positioned by Kiai. Since that time to now, the leadership of Kiai has decreased. In New Order era, many Kiais were organized as supported organization of ruling party. It was mutualism relation, ruling party got mass supports and Kiai got material support for himself and pesantren. Jawara are rural strongmen or semi socially embedded men of prowess who are skillful in pencak silat and some are believed to have magical power, called ilmu. Some Jawara has been organized by Golkar party, since 1972. In post-Soeharto era, jawara has been predominance power. They put their family in many political positions both in executive and legislative. They use intimidation and violence to get their aim. On the other side, Kiai had been fragmented in many political powers, but still as supporting actor not as the main one. To fulfill their needs, both for their selves and for pesantren, some Kiais has done pragmatically and depended on others. The mix of political and economic weakness made Kiai failed to be a main actor in banten local politics.*

*Keywords: Local politics, Local political actors, Power*

## A. PENDAHULUAN

**Banten** adalah satu wilayah yang berada di ujung barat Pulau Jawa. Walaupun Provinsi Banten baru terbentuk pada tahun 2000, masyarakat Banten memiliki kesatuan politik di masa lalu sebagai sebuah kesultanan dalam waktu yang cukup lama, yakni 1526 M sampai 1828 M. Di era kemerdekaan sampai menjadi Provinsi, Banten merupakan sebuah karesidenan, bagian dari Jawa Barat. Provinsi Banten kini terdiri dari Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan.

**Islam** adalah agama terpenting di Banten dengan jumlah pemeluknya sebesar 95,89%. Pemeluk agama lainnya: Katolik 1,03%, Protestan 0,22%, Hindu 0,22%, Budha 1,15% dan sisanya memeluk agama lokal (Sunda Wiwitan) (Banten Dalam Angka, 2007). Selain itu masyarakat muslim di Banten juga dianggap lebih taat menjalankan ajaran agamanya dibandingkan masyarakat muslim di tempat lain. Van Bruinessen melaporkan bahwa:

*“The populations of Banten were more faithful than other Javanese in the observance of such religious obligations as the fast during Ramadhan and the payment of Zakat. Moreover, unlike elsewhere the payment of zakat in Banten served to strengthen independent ulama – the Kiai or guru – as against the official religious functionaries who usually administered (and enforced) zakat (Van Bruinessen, 1995: 165).”*

Melihat komposisi diatas, maka bisa dipahami jika kepemimpinan pemimpin agama Islam menempati posisi yang amat penting. Secara kultural, pemimpin agama di Banten disebut **Kiai**. Kiai biasanya memimpin sebuah pondok pesantren. Jumlah pondok pesantren di Banten pada tahun 2006/2007 mencapai 1682 buah. (Departemen Agama, 2008).

Namun tak hanya ada Kiai di Banten. Jawara juga adalah salah satu elit kultural yang penting. Fenomena Jawara di Banten tak terlepas dari fenomena “Jago” yang pada umumnya ada di berbagai tempat di Jawa. Posisi jago tak bisa terlepas dari sejarah kekuasaan di Jawa secara umum. Pada masa prakolonial

organisasi jago merupakan satu-satunya alat penguasa. Bahkan seorang Raja seringkali dinisbatkan pada sosok seorang jago, meskipun ia harus memiliki wahyu kedaton sebagai legitimasi.

Tapi dalam praktik kekuasaan politik seorang penguasa diukur dari jumlah kekuatan yang dimiliki dan raja tidak lain adalah seorang jago (Ong Hok Ham, 2002: 102). Di berbagai tempat jago ini memiliki penamaan yang berbeda, di Banten ada Jawara, di Madura ada "Blater", dan di Jawa pada umumnya disebut "Bandit" atau "Kecu" (Rozaki, 2004: 9).

## **B. PEMBAHASAN**

### **B.1. Memahami Kiai dan Jawara**

Menurut asal-usulnya, perkataan kiai dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda: (1) Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat; (2) Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya; (3) Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya.

Dalam tulisan ini, kiai digunakan dalam pengertian ketiga. Kiai merupakan kelompok elite secara kultural, sosial, politik maupun ekonomi. Mereka merupakan pengajar agama (*preacher*) yang rata-rata sekaligus pemilik tanah yang luas. Mereka dianggap dan menganggap diri memiliki suatu posisi atau kedudukan yang menonjol baik pada tingkat lokal maupun nasional. Dengan demikian, mereka merupakan pembuat keputusan yang efektif dalam sistem kehidupan sosial orang Jawa, tidak hanya dalam kehidupan keagamaan, tapi juga dalam soal-soal politik (Dhofier, 1982:55-56).

Kiai karena kedalaman ilmu yang dimilikinya memiliki potensi kekuatan spiritual yang disebut magi. Magi inilah yang kemudian dipelajari oleh jawara –elit kultural Banten lainnya, sebagai sumber kekuatan. Tihami (1992:200) mengungkapkan bahwa jawara adalah seseorang yang karena pemilikan kekayaan, menjadikannya dekat dengan kiai dan menjadi salah satu elemen kepemimpinan yang sangat berpengaruh di Banten. Pada dasarnya jawara memperoleh kekuatan fisik dan magi (hikmah, kekebalan, kebatinan) dari kiai. Bahkan seringkali dikatakan bahwa jawara adalah khadamnya kiai. Jawara menjadi elit kultural di Banten karena memiliki kemampuan pencak silat dan juga dipercaya memiliki ilmu kesaktian.

Sedangkan profil fisik Jawara adalah pendekar yang pintar silat dan memiliki ilmu kekebalan sehingga tidak mempan sabetan golok. Memiliki ilmu hikmah (supranatural) yang bisa didapatkan dengan berguru atau dari keturunan. Sehingga ada orang yang disebut Jawara karena faktor keturunan. Pakaiannya khas, berwarna hitam-hitam dan sikapnya selalu waspada dengan senjata terselip di pinggang.

Tihami mengungkapkan:

*"Kiai sejak zaman sultan dulu punya murid yang belajar ngaji sama Kyai. Diantara muridnya itu ada yang punya angleh (bakat) pada ilmu pengetahuan agama. Tapi, ada juga diantara murid Kyai yang punya angleh pada kecenderungan yang bernuansa kejuangan.*

*Lalu pada akhirnya yang cenderung pada ilmu agama itu namanya Santri, sedangkan yang cenderung pada kekuatan fisik dan bernuansa hikmah (Magi, penulis.) adalah Jawara. Dua-duanya murid Kyai. Oleh karena itu, Santri disebut pembela agama, kalau Jawara bertindak dalam perjuangan kemerdekaan dan perjuangan lain.*

*Jadi, Kyai mempunyai dua pasukan kekuatan, yaitu Santri dan Jawara. Jawara ini, meskipun kecenderungannya mempunyai kekuatan fisik, tetapi karena murid Kyai, maka diisi dengan*

*yang disebut ilmu hikmah. Jadi Jawara itu bukan hanya memiliki kekuatan lahir, tapi juga kekuatan batin.*

*Santri, mengandalkan ilmu agama, tetapi ia juga ikut berjuang bersama kiai. Karena itu, ia juga harus punya kemampuan mempertahankan fisik, meskipun porsinya kecil dibandingkan Jawara, tetapi kekuatan hikmahnya besar. Jawara kekuatan hikmahnya lebih kecil ketimbang santri.*

*Kekompakan Santri dan Jawara dibawah pimpinan kyai inilah sebetulnya kunci kemenangan dalam memperjuangkan masyarakat Banten. Pada waktu dulu, kemudian pada kurun berikutnya, kalau saya baca di tulisan orang Belanda, ada semacam perpecahan.” (Mansur, 2000: 269-270)*

Sejarah Banten tak terlepas dari kepemimpinan Kyai dan Jawara. Pemberontakan-pemberontakan terpenting yang terjadi di Banten seperti Geger Cilegon 1888 (Kartodirdjo, 1984) dan Pemberontakan Komunis 1926 (Williams, 2003) menempatkan Kyai dibantu jawara sebagai pemimpin dan penggerak utama. Bahkan revolusi 1945 membuat rakyat secara spontan menempatkan para Kyai sebagai pemimpin formal, baik sipil maupun militer. Posisi Residen, Bupati, Camat, Wedana sampai Kepala Desa dijabat oleh Kyai. Bahkan pemimpin militer di Banten waktu itu dijabat Kyai Sjam'un yang kelak bergelar Brigadir Jenderal. (Suharto, 2001)

## **B.2. Korporatisme a la Orde Baru**

Karena kuatnya posisi Kiai dan Jawara sebagai elit kultural di Banten, maka ketika orde baru berkuasa, kedua elit tersebut dibidik menjadi tulang punggung Golkar di Banten. Untuk mewujudkan gagasan ini, aparat pemerintah daerah menyadari bahwa mereka perlu membicarakannya kepada pimpinan militer dan pemerintah yang lebih tinggi. Gagasan ini disambut dengan penuh antusias oleh Gubernur Solichin G.P dan Panglima Kodam Siliwangi A.T. Witono. Maka ditemukanlah kedua pejabat tersebut dengan K.H. Mahmud, seorang kiai yang disegani oleh masyarakat Banten. Pertemuan ini berlanjut dengan datangnya Pangkowihaan II (Jawa-Madura) Letnan Jenderal Surono untuk menemui K.H. Mahmud dan para kiai Banten.

Pertemuan ini belum menghasilkan seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah Orde Baru, yaitu agar para kiai masuk ke Golkar. Akhirnya pada pertemuan antara Presiden Soeharto dengan K.H. Mahmud di Batukuwung, Kiai Mahmud dan para Kiai menyatakan diri sebagai pendukung Golkar. Maka pada tanggal 3 Mei 1970 berdirilah organisasi Satkar Ulama, dengan Ketua Umum K.H. Mahmud. (Sudiati Artati, 1988: 45).

Turun langsungnya Presiden RI Soeharto untuk “menjinakkan” para kiai menunjukkan betapa posisi kiai dianggap sentral di Banten. Nampaknya, pemerintah pusat memahami betul bahwa sejarah masyarakat Banten lekat dengan kepemimpinan kiai. Merangkul kiai berarti mempermudah dalam menancapkan kekuasaan semakin dalam ke masyarakat Banten.

Pembentukan Satkar Ulama merupakan bagian dari strategi korporatisasi yang dilakukan oleh pemerintah orde baru melalui Golkar. Kelompok dalam masyarakat dikotak-kotakkan untuk kemudian mempermudah dikuasai dan membuat aspirasi memiliki jalur resmi yang mudah dikontrol. Tak hanya kiai di Banten yang “dijinakkan” dengan strategi ini, kelompok kultural lain di Banten yaitu jawara juga dikuasai, dikontrol dan kemudian menjadi pilar orde baru di Banten melalui pembentukan Satuan Karya Jawara yang kemudian berganti nama menjadi Persatuan Pendekar Pesilatan Seni Budaya Banten Indonesia (PPPSBBI).

Satkar Ulama kemudian menjadi anggota dari Hasta Karya, organisasi sayap Golkar. Terdapat dua jenis organisasi dalam Hasta Karya. Pertama, organisasi yang mendirikan Golkar yaitu : *Kesatuan Organisasi Serba Guna Gotong Royong* (Kosgoro), *Musyawahar Kekeluargaan Gotong Royong* (MKGR), dan *Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia* (Soksi). Kedua, Organisasi yang didirikan Golkar yaitu *Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia* (AMPI), *Satkar Ulama*, *Al-Hidayah*, *Himpunan Wanita Karya*, and *Majelis Dakwah Islamiyah* (MDI).

Menjelang Pemilu 1971, para kiai yang tergabung dalam Satkar Ulama tidak hanya melakukan kampanye terbatas dalam pesantren yang mereka pimpin, tetapi juga terjun ke pengajian-pengajian di mesjid-mesjid agar umat Islam di Banten memilih Golkar.

Di lain pihak jajaran pemerintah daerah melakukan upaya untuk mempengaruhi penduduk sampai pada tingkat pedesaan. Karena itulah kemudian Golkar mampu mendapatkan suara terbanyak sebesar 49,83% dalam pemilu 1971, mengalahkan partai-partai yang lebih senior seperti PNI, Parmusi (eks Masyumi) atau PSII.

Setelah fusi partai tahun 1973 jumlah peserta pemilu hanya 3 partai. Partai-partai Islam yaitu NU, Parmusi, PSII dan Perti bergabung menjadi PPP dan partai nasionalis serta Kristen yaitu Parkindo, Murba, IPKI dan Partai Katolik bergabung menjadi PDI.

Dalam menghadapi pemilu 1977 para pimpinan PPP melakukan konsolidasi habis-habisan. Para kiai PPP meningkatkan pengajian baik di pesantrennya maupun ke daerah lain. Didalam pengajian maupun khotbah jumat mereka menegaskan identitas PPP sebagai partai Islam, hal ini dilakukan untuk membangkitkan sentimen keagamaan. Hal ini diperkuat dengan digunakannya Ka'bah sebagai lambang partai. Akibatnya pada Pemilu 1977 PPP menang di Serang dengan 54,97%. Golkar berada di posisi kedua dengan 42,52% sedangkan PDI menjadi juru kunci dengan suara 2,52%. Namun hal ini ditebus dengan banyaknya pendukung PPP (termasuk para Kiai) yang dibawa ke Kodim untuk diinterogasi atau ditahan. (Artati, 1988: 47)

Namun, di era orde baru Kiai yang tidak kooperatif justru mendapatkan represi dari pemerintah. Abuya Dimiyati – seorang Kyai yang amat kharismatis di Banten -- pernah ditangkap dan dipenjarakan menjelang Pemilu 1977. Penangkapan Abuya Dimiyati dikarenakan pernyataan Abuya Dimiyati yang dianggap menyerang pemerintah dan Golkar. Pada hari Jum'at 11 Maret 1977, Abuya Dimiyati sebelum khutbah jum'at mengatakan kepala desa setempat, supaya masyarakatnya jangan ditakut-takuti dan diintimidasi oleh kepentingan salah satu kontestan pemilu, dengan berbagai ancaman, salah satunya dengan pernyataan bahwa "*Golkar itu Pemerintah*". Abuya Dimiyati mengungkapkan bahwa "*Pemerintah adalah RI dan bukan Golkar*" (Murtadlo, 2008:192-198). Situasi memanas, dan pada tanggal 14 Maret 1977 Abuya Dimiyati ditangkap oleh aparat kepolisian. Abuya kemudian divonis enam bulan penjara.

Di sisi lain, Jawara juga diorganisir oleh kekuatan orde baru. Rezim orde baru mengorganisir para jawara dengan membentuk organisasi Satuan Karya (Satkar) Jawara pada tahun 1971. Satkar jawara dipimpin oleh H. Tubagus Chasan Sochib. Yang melantik adalah Jenderal Soerono. Pembentukan Satkar Jawara ini dilaksanakan di Batukuwung Serang, dihadiri oleh Danrem 064/ Maulana Yusuf Banten, Kol. Inf. Anwar Padmawijaya, Pangdam VI/ Siliwangi, Gubernur Jawa Barat, Solichin GP, dan beberapa pimpinan nasional.

Pembentukan Satkar Jawara hampir bersamaan dengan pembentukan Satkar Ulama, organisasi Ulama Golongan Karya yang bertujuan merangkul para

kiai. Satkar Jawa pun memang didesain sebagai organisasi otonom di bawah Golkar untuk menggalang potensi jawara di Banten yang memang merupakan pemimpin informal di Banten. Dua kekuatan, Ulama (Kiai) dan Jawa dirangkul oleh Golkar. Akhir tahun 1973 Satkar Jawa berubah nama menjadi Persatuan Pendekar Persilatan Seni Budaya Banten Indonesia (PPPSBBI).

Dari hubungannya dengan Golkar dan pemerintah Orde Baru, Jawa mendapatkan keuntungan berupa akses politik dan ekonomi sebagai landasan struktural untuk memperpanjang dominasinya. Dari sana muncul pengusaha-pengusaha baru yang muncul dari memanfaatkan distribusi proyek yang beredar dikalangan Jawa. Maka bila diperhatikan, profesi sebagian besar Jawa yang tergabung dalam PPPSBBI adalah pengusaha, terutama pengusaha pelaksana proyek-proyek pemerintah. Para Jawa yang berbisnis sering disebut sebagai Kelompok Rawu. Penamaan ini dikarenakan pusat pengendalian bisnis dilakukan dari kantor KADIN di daerah Pasar Tradisional Rawu, Banten.

Chasan Sohib, tokoh Jawa, adalah pengusaha besar di bidang konstruksi. Usahanya berkembang pesat di awal Orde Baru. Ia menceritakan :

*“Pada awal program pemerintah melaksanakan pembangunan Pelita I tahun 1969, saya membuat perusahaan jasa konstruksi di bidang pemborongan bangunan-bangunan, jalan-jalan, dan irigasi-irigasi. PT Sinar Ciomas Raya Contractor pada tahun 1973 melaksanakan pembebasan tanah di PT. Krakatau Steel.*

*Bapak Tubagus Syaparudin memberikan kepercayaan kepada PT. Sinar Ciomas Raya Contractor untuk membangun pasar Rawu diatas areal sekitar 50.000 m<sup>2</sup>, kontrak full financing, pelaksanaan pembayaran APBD seadanya, bila dikabulkan tambahan secara berangsur dari dana inpres Pelaksana proyek Pasar Rawu diangsur sampai dengan lima tahun oleh Pemda Serang, dan dibantu oleh Depdagri, Bapak Amir Machmud” (Mansur, 2000: 94)*

### **B.3. Kiai dan Jawa Paska Orde Baru**

Saat gelombang reformasi meluas di seluruh Indonesia, pada tanggal 19 Mei 1998, Jawa atas nama Pendekar Banten, dipimpin Chasan Sohib, mengadakan jumpa pers di alun-alun barat kota Serang. Mereka menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan Soeharto.

Karena acara ini diliput pers dan disiarkan ke seluruh Indonesia, maka orang-orang Banten di berbagai daerah Indonesia – terutama mahasiswa – banyak mengalami perlakuan tidak baik dari masyarakat, seperti makian bahkan pemukulan. Orang Banten dianggap mendukung Soeharto.

Peristiwa ini membuat mahasiswa asal Banten yang sedang membanjiri gedung DPRD Serang untuk menyuarakan reformasi naik pitam. Pada tanggal 20 Mei 1998, mereka akhirnya berhasil “mengadili” Chasan Sohib di depan gedung DPRD Kabupaten Serang. Sebelumnya dalam pertemuan antara Jawa dengan ketua kelompok mahasiswa di Korem, Chasan Sohib menolak bertemu. Baru setelah diberi jaminan keamanan dia bersedia datang. Dengan pengawalan ketat mahasiswa, dihadapan ribuan mahasiswa, Chasan meminta maaf atas pernyataannya (Wawancara dengan Hasan Basri, mantan Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI) Banten, tanggal 10 Mei 2004).

Gambaran diatas menunjukkan bahwa Golongan Karya dan pemerintahan Orde Baru adalah mitra koalisi utama bagi Jawa. Jawa dianggap membesarkan Golkar, bahkan menjaga eksistensi partai tersebut di Banten setelah reformasi. Ketika Golkar ramai-ramai dihujat, yang terkena juga Jawa. Karena itu pengaruh Jawa terhadap Partai Golkar di Banten amatlah besar.

### **B.4. Dominasi Jawa**

Semenjak Banten jadi Provinsi, bahkan dalam pembentukan Provinsi Banten, Chasan Sochib sebagai tokoh jawara tampil dominan. Padahal ia awalnya tidak setuju terhadap gagasan Banten menjadi Provinsi.

Gagasan pembentukan Provinsi Banten awalnya berasal dari para kiai ketika pada awal tahun 1999, Pada hari Jum'at 5 Februari 1998 Presiden Habibie berkunjung ke Banten di Pondok Pesantren Darul Iman Pandeglang yang dipimpin K.H. Aminuddin Ibrahim. Sesuai dengan skenario yang dirancang para Kiai, pertemuan juga diikuti Gubernur Jawa Barat dan para Menteri yaitu Mensesneg Akbar Tandjung, Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto, Menteri Agama Malik Fajar, Menteri Koperasi/Pengusaha Kecil dan Mengengah Adi Sasono.

Dalam pertemuan itu, K.H. Aminudin Ibrahim mengusulkan agar wilayah eks Keresidenan Banten ditingkatkan menjadi Provinsi Banten. Dalam kesempatan itu, Presiden BJ. Habibie tidak menolak usulan itu, hanya menyatakan bahwa usulan itu harus melalui mekanisme konstitusional. (Mansur, 2001:127).

Namun pada proses selanjutnya bola sepertinya dikuasai oleh kelompok jawara dan para pengusaha. Peran Kiai dalam proses terbentuknya Provinsi Banten nampak tidak terlalu menonjol, terdominasi oleh kelompok jawara yang seringkali mengerahkan massa berpakaian hitam-hitam membawa golok di berbagai event.

Dominasi kelompok jawara terlihat dalam berbagai peristiwa, seperti proses pengisian anggota DPRD Banten dan proses pemilihan Gubernur Banten tahun 2001 yang mampu menempatkan anak Chasan Sochib, Atut Chosiyah menjadi Wakil Gubernur.

Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Jawara untuk memenangkan pemilihan Gubernur Banten 2001. *Pertama*, mereka memenangkan pertarungan di internal Golkar mengenai posisi apa yang akan diambil dan siapa yang akan dimajukan. Jawara berhasil memajukan Ratu Atut Chosiyah sebagai calon Wakil Gubernur dan menyingkirkan Aly Yahya yang telah mengambil formulir sebagai calon Gubernur dari Partai Golkar.

*Kedua*, Jawara berhasil mengacaukan koalisi PPP dengan PDIP. Caranya, Golkar menggandeng PPP sebagai mitra koalisi utama, dengan pendekatan langsung Chasan Sochib – tokoh Jawara, tokoh Partai Golkar Banten, Ayah Atut Chosiyah – ke Djoko Munandar, Ketua DPD PPP Banten. Dengan mesin politik utama Golkar dan Jawara, para kader yang bergabung di tim sukses berbagai fraksi memberikan suara ke pasangan Djoko-Atut.

*Ketiga*, Jawara melakukan intimidasi dengan mengerahkan kekuatan massa atas nama tenaga pengamanan. Bahkan di dalam ruang sidang Jawara hadir. Ini memberikan tekanan psikologis kepada anggota Dewan. Selain itu aktivitasancam mengancam juga berjalan walaupun dihembuskan melalui desas-desus selama proses pemilihan.

*Keempat*, Jawara melakukan politik uang. Kuat indikasi mereka membeli suara anggota Dewan dengan harga ratusan juta rupiah. Dengan ini posisi mereka semakin kuat.

*Kelima*, penguasaan opini. Jawara melakukan kontrol terhadap opini yang berkembang terutama di media massa lokal. Jawara dengan kepentingannya agar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dilanjutkan, berhasil mengendalikan opini. Jawara memiliki dua strategi. *Pertama*, membeli kalangan media yang mendukung kepentingan Jawara. *Kedua*, menekan kalangan media yang dianggap tidak kooperatif dengan kekerasan.

Dengan berbagai strategi inilah kemudian Jawara berhasil menempatkan Djoko Munandar dan Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur

Banten untuk Periode 2001-2006. Memiliki peran besar dalam naiknya pasangan Djoko-Atut di bursa pemilihan Gubernur banten diakui oleh Chasan Sochib menjawab pertanyaan seorang wartawan apakah Gubernur berada dibawah bayang-bayang Jawa?

*"Tidak seperti itu. Abah cuman kasih pandangan-pandangan. Kalau dia berbuat keliru dalam mengemban amanah kepemimpinan di Banten, Abah akan luruskan. Sebab Abah yang paling bertanggungjawab dengan Djoko. Sebab dia naikkan atas dukungan Abah. Oleh karena itu Abah malu kalau Djoko keliru dalam memimpin. Kalau keliru memimpin lebih baik tanggalkan saja jabatannya itu. Djoko itu kan tidak ada apa-apanya." (Saya memang Gubernur Jendral, dalam Tabloid Mimbar Daerah, Edisi 17-23 November 2003)*

Jelas dalam pernyataan diatas Chasan Sochib menegaskan posisinya di Banten dan perannya dalam menaikkan Djoko sebagai Gubernur. Sebagai tokoh yang dianggap paling berpengaruh di Banten, Chasan Sochib sering dianggap sebagai Gubernur Jenderal, julukan yang tak pernah dibantah oleh dirinya.

Dominasi jawara ini bersitemali dengan berbagai aksi kekerasan yang terjadi di Banten dengan wartawan sebagai pihak yang paling sering jadi korban. Sebuah kejadian menimpa redaktur pelaksana harian Banten (Sekarang Radar Banten). Demonstrasi massa berpakaian Jawa di depan Gedung DPRD mendukung dilanjutkannya pemilihan Gubernur berjumlah 80 orang diliput dan diberitakan oleh Harian Banten apa adanya. Malamnya sepasukan Jawa mendatangi Kantor Radar Banten dan mengalungkan Golok ke leher Redaktur Pelaksana. Mereka ingin massa yang ditulis berjumlah ribuan, bukan hanya delapan puluh (wawancara dengan Abdul Malik, 10 Juni 2004). Wajar jika kemudian pers lokal tak berani bersuara kritis terhadap aktivitas negatif Jawa.

Kasus kekerasan lainnya menimpa mahasiswa yang sedang berdemonstrasi dalam rangka pelantikan anggota DPRD Banten. Waktu itu 750 Jawa membentuk pagar mengelilingi Gedung DPRD Banten atas nama pengamanan. Suasana sudah mencekam dari sejak pagi. Jumlah polisi hanya dalam hitungan puluhan.

Kekerasan terjadi ketika mahasiswa yang berjumlah sekitar seratus orang hendak masuk ke gerbang menemui anggota DPRD yang selesai dilantik dengan tujuan menyampaikan aspirasi. Mendekati gerbang mahasiswa dihalau oleh Jawa yang bahkan beberapa orang diantaranya sempat menghunuskan golok. Mahasiswa kocar-kacir menyelamatkan diri ke kampus STAIN yang terletak persis di seberang Gedung DPRD. Sebagian mahasiswa membalas dengan melakukan pelemparan batu ke arah kerumunan Jawa. Beberapa mahasiswa terluka dalam kejadian itu (*"Pelantikan Anggota DPRD Diwarnai Bentrokan"* dalam Harian banten, 7 Juli 2001).

Menariknya, kasus-kasus kekerasan yang melibatkan kalangan Jawa tak pernah tersentuh hukum. Semua kasus dianggap selesai begitu saja. Hal ini dikarenakan keeratn hubungan antara tokoh-tokoh Jawa dengan petinggi aparat keamanan. Sebagai kelompok strategis Jawa sukses membangun koalisi.

Bahkan dominasi jawara mampu membuatnya menguasai organisasi para kiai seperti terjadi pada Satkar Ulama. Chasan Sochib memenangkan pemilihan Ketua dalam Kongres Pimpinan Pusat Satkar Ulama dengan pada tahun 2000, 67 suara berhadapan dengan calon lain.

Chasan yang bukan Kiai mengalahkan Kiai Salman Al Faris melalui pertarungan dua putaran. Kiai Salman menduga bahwa terdapat penyusup yang kemudian menjadi pemilih di arena Kongres yang berasal dari kalangan Jawa, anak buah Chasan Sochib (Wawancara dengan kiai Salman Al Faris, Wakil Ketua Satkar Ulama Indonesia, tanggal 12 Agustus 2008). Situasi ini menunjukkan kondisi

baru bahwa organisasi para ulama tidak dipimpin oleh seorang kiai, tapi seorang jawara. Hal ini adalah sebuah paradoks, mengingat secara sejarah jawara adalah murid atau bahkan khadamnya para kiai.

Hal serupa terjadi di Satkar Ulama Wilayah Banten. Ketua Satkar Ulama Wilayah Banten sekarang, Kiai Syahrir Abror yang menggantikan Kiai Subroni Mansyur pada tahun 2002 bukanlah berasal dari kalangan pesantren. Dahulu ia adalah seorang satpam sebuah perusahaan di Cilegon. Seorang kiai bahkan mengatakan bahwa ia tidak mampu menulis huruf arab dengan benar (Wawancara dengan Kiai Salman Al Faris, 12 Agustus 2008).

Kepemimpinan Djoko sebagai Gubernur Banten tidak berlangsung lama. Pada tanggal 10 Oktober 2005 Presiden mengeluarkan Keppres No.169/M/2005 untuk memberhentikan sementara Gubernur Banten Djoko Munandar. Penyebabnya, Djoko waktu itu tengah menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi dana perumahan dan kegiatan penunjang DPRD Banten Rp 14 miliar yang berasal dari dana TT dalam APBD Banten 2003APBD Provinsi Banten Tahun 2003. Selanjutnya, presiden menunjuk Wakil Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah selaku pelaksana tugas dan penanggung jawab Gubernur Banten.

Yang menarik adalah bahwa Atut Chosiyah sama sekali tidak pernah diperiksa atau dimintai keterangan dalam kasus ini. Padahal dalam BAP dan keterangan anggota dewan jelas-jelas disebutkan bahwa Atut ikut dalam rapat-rapat untuk kompensasi dana perumahan (“*Rekaulang Berdasarkan Waktu Kejadian Dana Perumahan*” diakses pada tanggal 20 Oktober 2006) . Yang jelas peristiwa lengsernya Djoko mengantarkan Atut menjadi *incumbent* yang amat diperhitungkan dalam.

Pilkada langsung Gubernur banten tahun 2006 diikuti empat pasang calon, mereka adalah:

**Tabel 1 : Nomor Urut, Pasangan Calon dan Partai Pendukung**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung dan Jumlah Kursi di DPRD
11	Trjana Sam'un – Benyamin Davnie	PAN (4 kursi), PPP (8 kursi)
No Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung dan Jumlah Kursi di DPRD
22	Atut Chosiyah – Masduki	P. Golkar (16 kursi), PDIP (10 kursi), PBR ( 5 kursi), PBB (3 kursi), PDS (2 kursi), PKPB (1 kursi) dan Partai Patriot
33	Irsjad Djuwaeli – Mas Achmad Daniri	P. Demokrat (9 kursi), PKB (5 kursi)
44	Zulkifliemnasyah - Marissa Haque	PKS ( 11 kursi), PSI (1 kursi)



Posisi sebagai incumbent membuat Atut dan Jawara kelompok Rawu leluasa memaksimalkan posisinya sebagai Plt. Gubernur untuk meraih dukungan seluas mungkin. Aspek yang pertama kali "dibenahi" adalah menjadikan birokrasi sebagai mesin politik yang loyal dan kuat. Salah satu yang mencuat ke publik adalah pergantian sekda dari Chaeron Muchsin ke Hilman Nitiamidjaja dan pencopotan 12 pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Pergantian yang dilaksanakan menjelang Pilgub langsung menimbulkan banyak praduga bahwa itu adalah upaya Atut membersihkan loyalis Djoko dan menjamin mesin birokrasi berpihak padanya.

Salah satu mesin politik lain yang patut diperhitungkan adalah dibentuknya Relawan Banten Bersatu (RBB) yang didirikan pada bulan Mei 2006 oleh ayah Atut, Chasan Sochib ("*Relawan Banten Bersatu, Mengantisipasi Disintegrasi Bangsa*", Laporan Khusus Majalah Teras No. 75/ Edisi Juni 2006/ Th Ketujuh). Selain Pendekar Banten berbagai elemen berhasil ditarik melalui RBB ini seperti Badan Pembina Potensi Keluarga Besar Banten (BPPKB) yang merupakan organisasi Jawara besar yang cukup kuat di Pandeglang dan Tangerang. Salah seorang kandidat Walikota Cilegon, Ade Miftah yang dalam Pilkada Cilegon diusung PKS bahkan menjadi fungsionaris RBB Cilegon. Tokoh lain yang terlibat di RBB adalah H. Lulu kaking, Endoh Sugriwa, KH. Sahrir Abror, Jajat Mujahidin, dan tokoh-tokoh yang lain.

Incumbent memiliki seorang tim sukses yang mengoordinasi kalangan birokrasi untuk memberikan kontribusi, ia dikenal sebagai ASDA IV atau ASDA swasta. Lebih spesifik sang ASDA IV melakukan intervensi di Biro Humas. Menurut Bambang Santosa, Kabag Dokumentasi Biro Humas Pemprov Banten membenarkan design iklan untuk media cetak bukan murni dari Biro Humas. Bambang Santoso mengatakan, "*itu dari Pak Asda IV. Kami tidak bisa mengelak. Ibu kan Plt Gubernur Banten*". Hal sama terjadi pada iklan kerja sama di 3 media cetak di Banten. Kerja sama itu mengeksploitasi Atut Chosiyah sebagai Plt Gubernur Banten. Pemanfaatan jaringan birokrasi oleh LBB (Lembaga Banten Bersatu, salah satu Think thank tim sukses Atut) melalui Asda IV dilihat dari anggaran Biro Humas Pemprov Banten tiba-tiba membengkak dari Rp 1,3 miliar yang diajukan menjadi lebih Rp 2 miliar.

Sebagian besar anggaran itu untuk sosialisasi. "*Semuanya didrop dari atas, bukan inisiatif dari biro itu sendiri,*" kata pejabat di Pemprov Banten. Hal sama terjadi pada Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Biro Perekonomian yang membengkak 250 persen dari anggaran yang diajukan. Sebagian besar anggaran itu untuk bantuan dan kegiatan sosial yang bersifat pengumpulan massa. Pemasangan spanduk, billboard, iklan di media cetak dan elektronik justru tidak berurusan dengan pejabat di lingkungan Pemprov Banten. Padahal semuanya menggunakan logo dan mengatasnamakan Pemprov Banten. Contohnya, spanduk Banten Gerbang Investasi yang marak di Cilegon, ucapan hari raya dan sebagainya (Banten Link, 27 Februari 2006).

Spanduk lain berusaha memunculkan image Rt. Atut Chosiyah digambarkan sebagai ibu yang peduli AIDS, peduli Kesehatan anak melalui kampanye PIN (Pekan Imunisasi Nasional) dan Banten Sehat 2010, Perempuan religius dengan mengucapkan selamat perayaan hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Natal, Haji dan Kurban, digambarkan pula sebagai pendukung kegiatan-kegiatan pemuda dan pelajar seperti festival Rock se-Banten.

Pola yang lain adalah dengan memobilisasi sumber dana untuk kegiatan "sinterklas" *incumbent* atau bagi-bagi bantuan untuk masyarakat maupun LSM.

Menjelang pilkada, dalam APBD Perubahan 2006, terdapat penambahan anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat (Biro Kesra) Rp 5,7 miliar untuk ormas dan profesi dengan alasan untuk memenuhi 5.800 proposal dari masyarakat yang masuk ke Pemprov Banten. Dalih ini menggamangkan masyarakat yang telah rela uangnya dipotong pajak dan retribusi untuk dikumpulkan menjadi anggaran pemerintah. Sebab sebelumnya, Biro Kesra memperoleh alokasi anggaran Rp 64,5 miliar, di antaranya Rp 62,5 miliar untuk bantuan organisasi kemasyarakatan dan profesi. Dengan dalih ini, tersirat dana di Biro Kesra telah habis dibagi-bagikan.

Sementara, justru untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat justru dikurangi. Dalam nota disebutkan, anggaran beberapa kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat dipangkas. Salah satunya, anggaran program peningkatan kesejahteraan pangan dan gizi dipangkas Rp 3,2 miliar, dari Rp 13 miliar menjadi Rp 9,8 miliar.

Demikian juga anggaran pembinaan dan pengembangan usaha bidang kelautan dan perikanan dipangkas dari Rp 2 miliar menjadi Rp 1 miliar. Anggaran penanganan masalah kemiskinan juga dipangkas dari Rp 3 miliar menjadi Rp 2 miliar, serta anggaran pendidikan dari sekitar Rp 75 miliar menjadi Rp 72 miliar. Pemangkasan terbesar pada anggaran pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, dari Rp 9,7 miliar menjadi Rp 1,3 miliar (Kompas, 13 Juni 2006).

Hasil akhir dari Pilkada Gubernur menempatkan Atut – Masduki sebagai pemenang Pemilihan Gubernur Provinsi Banten dengan suara sebanyak 1,445,457 suara mengalahkan Zulkifliemansyah – Marissa Haque yang mendapat suara 1,188,195 suara. Sementara Tryana – Benjamin mendapatkan 818,276 suara diikuti Irsjad Djuwaeli – M. Ahmad Daniri yang mendapat 147,922 suara.

### **B.5. Terpinggirnya Kyai**

Kemana Kiai ditengah dominasi Jawara? Secara umum, Kiai di Banten di era reformasi terjebak sebagai penggembira dalam dunia politik.

Sebagai pemanis Kiai tetap dibutuhkan dalam praktek politik praktis. Dalam pilkada Gubernur tahun 2006 semua calon berupaya menjadikan kiai sebagai simpul massa untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Atut Chosiyah misalnya menjadikan Satkar Ulama sebagai salah satu unsur pendukung dalam tim sukses. Satkar Ulama sendiri adalah salah satu dari organisasi yang didirikan oleh Golkar dan sekarang dipimpin oleh Chasan Sohib, Ayah Atut.

Zulkiflimasyah mendapatkan dukungan dari Forum Komunikasi Kiai dan Tokoh Masyarakat (FKMT) yang dipimpin K.H. Ubung, Trjana Sjam'un mendapatkan dukungan dari beberapa pengurus Forum Silaturahmi Pondok Pesantren Banten, sedangkan Irsjad Djuwaeli mengandalkan dukungan Mathla'ul Anwar dan Kiai Khozinul Asror dari NU.

Kompetisi dukung mendukung di kalangan Kiai cukup keras. Atut Chosiyah sebagai incumbent gagal mendapatkan dukungan bulat dari para kiai . Para kiai yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Banten menolak memberikan dukungan kepada Atut dan memilih netral, walaupun beberapa pengurus mendukung Zulkifliemasnyah dan Trjana Sjam'un. Hal ini membuat tim sukses Atut mendirikan Forum Silaturahmi Pondok Pesantren Salafi (FSPPS) sebagai tandingan FSPP.

Akibat FSPP tidak mendukung pencalonan Atut, maka ketika Atut terpilih sebagai Gubernur Banten tahun 2007, anggaran untuk pesantren sebesar Rp. 750.000.000/tahun di APBD yang selama ini disalurkan melalui FSPP dihapuskan (Wawancara dengan Fatah Sulaeman, Ketua Harian FSPP, 8 Agustus 2008; Dan

Kiai Mahmudi, Mantan Ketua FSPP Kabupaten Serang, sekarang menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Serang, 22 Agustus 2008).

Dukung-mendukung di kalangan Kiai nampaknya menjadi fenomena yang marak dalam Pemilu dan Pilkada. Politisi memanfaatkan kiai untuk mendapatkan dukungan massa, dan kiai memanfaatkan momentum kompetisi politik untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Terdapat semacam pertemuan antara *demand* dari *politisi* dan *supply* dari Kiai. Bisa dikatakan politisi dan Kiai sama-sama aktif saling mendatangi.

Muchtar mandala mengatakan bahwa para kiai datang dan tanpa malu-malu menjanjikan jamaahnya untuk memilih dia asal permohonan bantuan proposalnya dipenuhi. Hal yang sama juga disampaikan oleh Fitron dari PKS dan La Ode Asrarudin dari Golkar. La Ode bahkan mengemukakan bahwa para politisi sendiri sudah pandai berkalkulasi untuk memilih kiai mana yang akan didatangi. Politisi lebih menyukai kiai Majelis Taklim karena lebih memiliki jamaah yang jelas dengan domisili yang jelas. Kiai pesantren justru kurang dijadikan target karena massanya adalah santri yang sebagian besar tidak memiliki hak pilih dan bisa jadi berdomisili di luar Banten (Wawancara La Ode Asrarudin, 12 Juni 2009).

Nampak sekali bagaimana Kiai di era paska orde baru tak lagi menjadi cultural broker, namun menjadi political broker. Hal ini salah satunya diakibatkan karena pesantren dan kiai berada dalam posisi yang lemah secara ekonomi. Padahal selama ini pondok pesantren selama ini dikenal sebagai lembaga pendidikan yang mandiri, baik dari segi kurikulum maupun pendanaan. Karena kemandiriannya itu, mereka sering menolak bantuan yang diberikan pemerintah, karena dianggap akan mengintervensi pesantren.

Sumber ekonomi pesantren dan kiai adalah sokongan yang diterima dari para santri yang menuntut ilmu. Karena itu semakin banyak santri yang datang ke suatu pesantren, maka semakin besar juga sumber ekonomi yang didapat oleh kiai dan keluarganya. (Horikoshi, 1987: 105)

Namun kini kemandirian pesantren dan jaminan kehidupan ekonomi keluarga kiai dan para pengasuh pesantren lainnya amat lemah. Para santri yang datang untuk belajar di pesantren, terutama pesantren salafi semakin berkurang. Selain itu, selepas dari pesantren salafi, kehidupan seorang santri menjadi sempit, karena tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh kehidupan modern. Sedangkan pendidikan umum dan modern lebih memberikan jaminan kepada lulusannya untuk memasuki dunia kerja. Karena itu pragmatisme kiai tampak mengemuka, bahkan seringkali secara amat terbuka.

Pragmatisme ini seringkali terlihat dalam berbagai perhelatan politik. Dalam Pemilu 2004, Kiai KA, tokoh NU di Kabupaten Pandeglang menganjurkan agar seorang calon anggota DPD mengumpulkan 40 Kiai Khos di Pandeglang untuk mendapatkan dukungan politik dalam bentuk istighosah. Saran itu diikuti dengan melakukan berbagai persiapan dan mengundang banyak tokoh. Namun menjelang pelaksanaan, Kiai KA tersebut mensyaratkan sejumlah uang sebagai imbalan bagi dirinya dan bagi 40 Kiai Khos tersebut. Hal ini membingungkan karena tidak pernah ada pembicaraan sebelumnya soal uang.

Namun karena undangan sudah disebar dan diberitakan lewat media, maka permintaan uang tersebut dipenuhi setelah proses tawar menawar. Jadilah istighosah tersebut dilaksanakan.

Namun betapa kagetnya sang calon DPD karena sekitar dua minggu kemudian, calon DPD yang lain melakukan istighosah dengan Kiai yang sama dalam skala yang lebih besar. Ia akhirnya menyimpulkan bahwa Kiai KA tak lebih dari *event*

*organizer* istighosah ntuk mendapatkan uang, bukan betul-betul memberi dukungan politik (Wawancara konfidensial dengan EAH, Calon anggota DPD dalam Pemilu 2004, tanggal 1 Agustus 2008).

Kejadian yang nyaris sama dengan kiai yang sama menimpa Muchtar Mandala sewaktu pencalonannya sebagai bakal calon gubernur Banten. Kiai KA yang seringkali datang menyatakan dukungannya ternyata ketahuan mendatangi Kiai Muhtadi Dimiyati bersama calon gubernur lain dan mengajukan rencana untuk memeras, menghabiskan uang Muchtar Mandala. Kiai KA dan calon itu tak tahu bahwa Kiai Muhtadi Dimiyati adalah pendukung utama Muchtar Mandala (Wawancara dengan Muchtar Mandala, tanggal 16 Juni 2009).

Tak jauh berbeda misalnya dalam pemilihan Presiden 2004. Dalam kegiatan Pengarahan Ketua Umum Partai Golkar tentang Koalisi Nasional bagi Pengurus dan Kader Partai Golkar se-Provinsi Banten, di Pandeglang, 21 Agustus 2004. Setelah pidato Akbar Tanjung sebagai Ketua Umum Golkar, KH Ujang Rapiudin, seorang pemuka agama setempat, secara blak-blakan bicara soal uang ketika hendak menutup acara dengan doa.

*"Ayeuna, rakyat mah teu butuh kaos, teu butuh poto, nu penting mah amplop nu dijerona aya duitnya (rakyat itu tidak butuh kaus, foto, tapi yang terpenting itu amplop yang di dalamnya berisi uang)."*

Rapiudin meminta kepada tim sukses jangan bodoh dalam membaca keinginan masyarakat. Daripada uang dihambur-hamburkan membagi-bagi kaus, lebih baik bila diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti wayangan, membelikan bola voli, dan lainnya. Yang penting sekarang, tim sukses ulah *balaloon*-nya, jangan bodoh ya, ucapnya dengan logat sunda yang khas (Kompas, 23 Agustus 2004. *Nu Penting Amplop Aya Duitna*).

Di kalangan pejabat, ada semacam pemahaman untuk memberikan bantuan kepada Kiai, disamping menjalin hubungan baik juga agar dalam pekerjaannya tidak mengalami gangguan dan dilindungi oleh kiai dan pengikutnya. Secara berkala misalnya MTG seorang Kepala Dinas di Provinsi Banten memberikan proyek tunjuk langsung (dibawah lima puluh juta) kepada seorang Kiai terkenal (Wawancara Konfidensial dengan MTG Kepala Dinas X di Provinsi Banten, tanggal 8 Desember 2008)..

Kondisi ini sering mendapat tanggapan sinis di kalangan masyarakat "*Di masa lalu pemerintah yang mendekati kiai, tapi sekarang kiai yang mendekati Pemerintah*" (Turmudi, 2003), atau "*Di masa lalu, Banten adalah tempat seribu kiai dan sejuta santri, tapi sekarang, kiai mendapatkan sejuta (rupiah dari politisi dan pemerintah) dan santri mendapatkan seribu (rupiah dari Kyai)*". Pada hari Idul Fitri, bukan pejabat pemerintah yang menemui kiai seperti di masa lalu, namun kiai yang mengantri bertemu pejabat untuk mendapatkan amplop (Wawancara dengan KH. Mahmudi, tanggal 22 Agustus 2008).

Namun apakah dukungan kiai memberikan jaminan dukungan masyarakat. Pada prakteknya, para politisi menyatakan bahwa dukungan kiai tidaklah sebesar yang dibayangkan. Zulkifliemansyah yang mengadakan kegiatan Silaturahmi dan deklarasi seribu Ulama di Lebak untuk mendukung pencalonannya dalam pemilihan Gubernur 2006 ternyata justru mendapatkan suara yang tidak signifikan di Kabupaten lebak (Wawancara dengan Fitron, pengurus DPW PKS Banten, tanggal 16 Juni 2009).

Dukungan Satkar ulama dan FSPPS kepada Atut juga dianggap kurang signifikan dibandingkan dukungan yang diberikan oleh Keluarga dan kalangan

jawara yang dipimpin oleh Ayah Atut, Chasan Sochib (Wawancara dengan La Ode, 12 Juni 2009).

Hal ini bisa jadi dikarenakan para kiai yang datang ke para politisi dan menghadiri kegiatan dukung-mendukung menganggap bahwa kehadirannya adalah sekedar memenuhi undangan dan bukan lantas wajib mendukung. Bahkan tidak jarang para kiai juga memberikan loyalitas ganda kepada beberapa calon sekaligus untuk mendapatkan keuntungan materi sehingga justru membingungkan jamaahnya (Hal ini dibenarkan oleh Fitron, La Ode, dan Muchtar Mandala).

Menurut Fitron, dukungan kiai lebih penting ke arah upaya membangun pencitraan daripada upaya mendapatkan dukungan riil pemilih. Ia berasumsi di masyarakat Banten, kedekatan dengan kiai memiliki konotasi positif yang mampu mendongkrak citra.

Namun tak semua kiai terjun dan nyaman berada di dunia politik. Kiai Munfasir di Ciomas adalah salah satu kiai di Banten yang tidak tertarik politik. Ia hidup mengasingkan diri di pesantrennya di Cipulus, Ciomas Banten. Pesantrennya dihuni tak terlalu banyak santri. Siapapun yang hendak menuntut ilmu disana tidak diperbolehkan memakan apa yang didapatkan dari luar pesantren. Mereka memakan padi yang ditanam di pesantren, memakan ikan yang dipelihara di sana dan memakan buah-buahan yang ditanam disana seperti pisang atau pepaya.

### **C. PENUTUP**

Sebagai elit kultural, Kiai dan jawara mengalami pasang surut kepemimpinan. Kiai bertransformasi dari pemimpin informal di masyarakat pedesaan kemudian mengalami masa puncak di era colonial dan revolusi kemudian menjadi tulang punggung Golkar di era orde baru. Namun Reformasi justru gagal menjadi momentum bagi bangkitnya kepemimpinan Kiai. Kiai yang terlena dan hilang kemandiriannya karena terlalu biasa menjadi penerima bantuan pemerintah menjadi sekedar pemeran pembantu – broker politik – di dunia politik praktis.

Jawara sebaliknya, ia lahir sebagai murid Kyai dan berada di bawah bayang-bayang charisma kepemimpinan Kyai. Namun kebijakan korporatis Golkar malah menjadikan mereka kekuasaan ekonomi yang dominan di Banten dengan proyek-proyek pemerintah yang diberikan rezim orde baru sebagai imbalan dukungan kepada Golkar.

Paska orde baru, Jawara justru mengalami transformasi selanjutnya dengan mengokohkan peranannya sebagai elit paling dominan dengan menguasai jabatan Gubernur Banten. Dominasi yang awalnya ditegakkan dengan kekerasan di awal terbentuknya Provinsi digantikan oleh penggunaan otoritas formal dan politik uang dengan tetap mempertahankan kekuatan massa.

### **DAFTAR RUJUKAN**

Artati, Sudiarti. *Perubahan Peran Ulama di Serang*. Skripsi Sarjana Strata 1 Jurusan Sosiologi FISIP UI. 1988.

Dhofier, Zamarkhsyari. *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES. 1982.

Geertz, Clifford. *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya. 1983.

Hamid, Abdul. *Peran Jawara Kelompok Rawu dalam Kemenangan Pasangan Djoko – Atut Sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Banten, Periode 2001-2006*. Skripsi S1 Departemen Ilmu Politik FISIP UI. 2004.

<http://pendis.depag.go.id/kerangka/pontren.htm>

Kartodirdjo, Sartono. *Pemberontakan Petani Banten 1888*, Jakarta: Pustaka Jaya. 1984.

Kompas, 26 Juli 2000. "Panglima Front Hizbullah Tewas Diberondong".

Kompas, 23 Agustus 2004. "Nu Penting Amplop Aya Duitna".

- Lubis, Nina. *Banten dalam Pergumulan Sejarah; Sultan, Ulama, Jawara*. Jakarta: LP3ES. 2003.
- Mansur, Khatib. *Profil Haji Tubagus Chasan Sochib Beserta Komentar 100 Tokoh Masyarakat Seputar Pendekar Banten*, Jakarta: Penerbit Pustaka Antara Utama. 2000.
- Masaaki, Okamoto dan Abdur Rozaki, (Ed). *Bos Lokal dan Kelompok Kekerasan di Era Reformasi*. Yogyakarta: Penerbit IRE. 2006.
- Media Indonesia, 26 Juli 2000. "*Ulama Sebagai Cultural Broker, Atau Pialang Politik*"
- Pikira Rakyat, 27 April 2004. "*Pengakuan 35 Menit yang Mengguncang.*"
- Radar banten 28 agustus 2006. "*Danrem Hadiri Pelantikan PPSBBI Banten*"
- Suara Karya, 25 Agustus 2005. "*Jelang Pilkada, Situasi Pandeglang Memanas.*"
- Suharto. *Banten masa Revolusi, 1945-1949. Proses Integrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Disertasi Doktor Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. 2001.
- Tabloid Mimbar Daerah, Edisi 17-23 November 2003. "*Saya memang Gubernur Jendral.*"
- Tihami, MA. *Kiai dan Jawara di Banten, Studi tentang Agama, Magi, dan Kepemimpinan di Desa Pasanggrahan Serang, Banten*, Tesis Master Antropologi Universitas Indonesia. 1992.
- Von Bruinessen, Martin. *Shari'a Court, Tarekat and Pesantren: Religious Institutions in the Sultanate of Banten*" Archipelago Journal, : 165-200. 1995.
- Williams, Michael C. *Arit dan Bulan Sabit Pemberontakan Komunis 1926 di Banten*. Jakarta Penerbit Syarikat, 2003. 2003.
- [www.Bantenlink.com](http://www.Bantenlink.com), *Rekaulang Berdasarkan Waktu Kejadian dana perumahan*.